



Optimalisasi Proses Penerbitan Grosse Akta untuk Kapal Nelayan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare

Ulia Fadhilah^{1*}, Yustiani Frastika², Iksan Saifudin³

¹⁻³Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Indonesia

Alamat: Jl. Trans Sulawesi KM. 80 Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara 95355

Korespondensi penulis : fadillahmulya8@gmail.com*

Abstract: *The process of issuing a Grosse Akta (Grosse Deed) at the Parepare Class III Harbormaster and Port Authority Office is crucial for ensuring the legality of fishing vessels operating in the region. However, several obstacles often arise, slowing the process and increasing the administrative burden on fishermen. One major obstacle is incomplete documentation, which hinders the smooth running of the administrative process. Many fishermen do not fully understand the required documents and administrative procedures. This results in longer processing times for issuing a Grosse Akta. Technical issues also contribute to a hindering process, particularly those related to systems that are not yet well integrated. The continued use of manual recording in some parts of the process often leads to errors or inaccuracies in vessel data processing. Furthermore, a shortage of trained experts in handling administrative documents also contributes to the delay in completion times. To address these obstacles, this study suggests several strategic steps that can be taken to improve the efficiency of issuing a Grosse Akta. A comprehensive and easily understood guide for fishermen will assist them in properly preparing the required documentation. Simplifying the document format can also speed up the process, while improving consultation and help desk services will provide faster assistance to fishermen experiencing difficulties. Furthermore, digitizing the document management system will speed up workflows and reduce reliance on error-prone manual record-keeping. These steps are expected to improve the efficiency of the Grosse Akta publication process and provide better service to fishermen. By implementing these strategies, it is hoped that the Grosse Akta publication process will be more transparent and easily accessible to all fishermen.*

Keywords: *Fishermen's Understanding, Fishing Vessels, Grosse Akta, KSOP Parepare Office, Optimization Strategy.*

Abstrak: Proses penerbitan Grosse Akta di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare sangat penting untuk memastikan legalitas kapal nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, sejumlah kendala sering kali muncul, memperlambat proses dan menambah beban administratif bagi nelayan. Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan berkas persyaratan yang menghambat kelancaran proses administrasi. Banyak nelayan yang tidak sepenuhnya memahami persyaratan yang diperlukan, baik dalam hal dokumen maupun prosedur administratif. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus penerbitan Grosse Akta menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Masalah teknis juga menjadi faktor penghambat, terutama yang berkaitan dengan sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Pencatatan manual yang masih digunakan di beberapa bagian proses sering kali menyebabkan kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengolahan data kapal. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam menangani dokumen administrasi juga berkontribusi terhadap ketidakpastian dalam waktu penyelesaian. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penerbitan Grosse Akta. Pembuatan panduan yang lengkap dan mudah dipahami oleh nelayan akan membantu mereka dalam mempersiapkan berkas persyaratan dengan benar. Penyederhanaan formulir dokumen juga dapat mempercepat proses, sementara peningkatan layanan konsultasi dan help desk akan memberikan bantuan lebih cepat bagi nelayan yang mengalami kesulitan. Selain itu, digitalisasi sistem pengelolaan dokumen akan mempercepat alur kerja dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rawan kesalahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penerbitan Grosse Akta dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nelayan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan proses penerbitan Grosse Akta akan menjadi lebih transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh nelayan.

Kata kunci: Grosse Akta, Kantor KSOP Parepare, Kapal Nelayan, Pemahaman Nelayan, Strategi Optimalisasi.

1. LATAR BELAKANG

Beberapa hal yang berkaitan dengan status hukum kapal dalam hukum maritim dan pengadilan laut adalah kepemilikan, pendaftaran, dokumen legal, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada kapal. Status hukum kapal dapat diketahui apabila telah melewati beberapa proses, seperti pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1171 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan bahwa pembebanan kapal laut sebagai jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan hipotek kapal laut harus menggunakan akta otentik. Akta otentik adalah bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, akta yang dimaksud adalah Grosse Akta Kapal atau bukti kepemilikan kapal.

Kebanyakan para nelayan tidak mendaftarkan kapal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya status kepemilikan kapal. Setiap kapal nelayan yang beroperasi secara sah harus memiliki dokumen resmi seperti Grosse Akta. Grosse Akta ini penting dalam proses transaksi keuangan, kapal pendaftaran, dan perlindungan hukum. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam menerbitkan Grosse Akta untuk kapal nelayan.

Selama melakukan praktek di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas III Parepare, penulis mendapatkan adanya pendaftaran Grosse Akta kapal nelayan yang terkendala pada bagian kelengkapan dokumen persyaratan dan pada bagian pembayaran. Hal ini menjadi masalah bagi pemilik kapal dan pihak Syahbandar.

Proses dan tahapan penerbitan bukti kepemilikan kapal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan penerbitan. Penulis berupaya mengkaji hal tersebut melalui penelitian dengan judul *Optimalisasi Proses Penerbitan Grosse Akta untuk Kapal Nelayan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare*.

2. KAJIAN TEORITIS

Penerbitan

Penerbitan adalah proses mempublikasikan untuk dokumen seperti akta tertinggi, penerbitan mengacu pada proses pembuatan suatu dokumen oleh pihak yang berwenang. Penerbitan adalah proses produksi dan penyebaran literatur atau informasi yang melibatkan berbagai tahap, dari penulisan hingga distribusi ke khalayak luas.

Grosse Akta

Martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa Grosse adalah salinan suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau Grosse dari suatu akta autentik yang pada bagian kepalanya memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa” (Martias Gelar Imam Radjo, 1987: 98).

Grosse Akta pendaftaran kapal termasuk dokumen resmi kapal yang berisi informasi rinci tentang kapal, seperti nama kapal, tahun pembuatan, negara asal, jenis kapal, pemilik, bobot kapal, dan nomor registrasi yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Pembuatan akta harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ditandatangani, mencantumkan peristiwa yang menjadi dasar suatu hak tau perikatan dan dirancang sebagai alat bukti.

Kapal Nelayan

Kapal nelayan adalah kapal yang dirancang untuk menangkap ikan dengan berbagai cara, seperti purse-seining, long-lining, beam trawl, dan buritan-trawling. Kapal ini sering dilengkapi dengan peralatan pendingin (kulkas) (2020, Shipping). Nelayan menggunakan kapal atau perahu yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional penangkapan ikan.

Berdasarkan teknologi yang digunakan, kapal penangkap ikan tradisional tidak dilengkapi dengan mesin (perahu tanpa motor) dan berukuran relatif kecil (≤ 5 Gross Tonnage), serta menggunakan alat tangkap berupa jaring atau jala. Kapal penangkap ikan modern dilengkapi dengan mesin (kapal motor) dan memiliki ukuran yang relatif besar untuk berlayar ke laut. Kapal modern menggunakan peralatan bantu elektronik seperti GPS dan fish finder dengan alat tangkap seperti pukot cincin, pukot hela, dan lainnya (Axelius, 2022).

Syahbandar

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit teknis eksekutif di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan (Barus, Prananingtyas, & Malikhatun, 2017). Sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan, syahbandar memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang angkutan laut, dan membantu dalam tugas pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan (Santosa & Sinaga, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lokasi terkait hal yang ingin diteliti.

Wawancara

Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari partisipan mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap suatu fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan sejak 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Juni 2024. Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare, Jl. Tarakan, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Proses Penerbitan Grosse Akta

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur, berikut beberapa tahapan proses penerbitan Grosse Akta:

- a. Mengajukan surat permohonan dari pemilik berupa surat keterangan tukang dan surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten dinas kelautan dan perikanan, surat ukur, bukti kepemilikan berupa Pas Besar, identitas pemilik dan surat kuasa jika dikuasakan beserta *fotocopy* KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa
- b. Menerima dokumen dari pemohon kemudian meregistrasi surat masuk pada lembar baju surat dan meneruskan kepada Kasubag Tata Usaha berupa disposisi surat
- c. Kasubag Tata Usaha menerima dokumen dari sekretaris kemudian memberikan paraf pada lembar disposisi surat dan meneruskan kepada kepala kantor
- d. Kepala kantor menerima dokumen yang telah diperiksa dan disetujui oleh Kasubag Tata Usaha. Kepala kantor kemudian meneruskan dokumen tersebut ke bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK). Proses ini memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke bagian yang tepat untuk diproses lebih lanjut.
- e. Kasi SHSK menerima dokumen dari kepala kantor kemudian memerintahkan petugas memproses dokumen persyaratan pendaftaran kapal untuk membuat nota tagihan PNBP dan memproses pendaftaran kapal, proses ini memakan waktu 2 hari

- f. Melakukan penilikan persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran kapal, membuat nota tagihan PNBP dan memproses pendaftaran kapal (Grosse Akta) oleh petugas pendaftaran kapal dan meneruskan ke Kasi SHSK
- g. Menandatangani Grosse Akta oleh kasi SHSK dan menyerahkan kepada sekretaris. Setelah dokumen selesai diproses dan diverifikasi, Kasi SHSK menandatangani Grosse Akta sebagai tanda bahwa dokumen tersebut sah dan siap untuk diterbitkan
- h. Setelah Grosse Akta ditandatangani, sekretaris kantor bertugas untuk meregistrasi surat keluar dan siap untuk diserahkan kepada pemohon.
- i. Langkah terakhir dalam proses ini adalah menyerahkan Grosse Akta yang telah selesai diproses dan ditandatangani kepada pemohon. Pemohon kemudian dapat menggunakan dokumen ini sebagai bukti sah kepemilikan kapal dan untuk berbagai keperluan administratif dan operasional lainnya.

Kendala Proses Penerbitan Grosse Akta untuk Kapal Nelayan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti ada beberapa kendala yang muncul dari pihak Syahbandar atas nama Brian Agung R. Justiyono, S.Tr.Pel sebagai Staf Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yaitu:

- a) Kurangnya sosialisasi mengenai Aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE)

Pemilik kapal nelayan tidak memahami dan bahkan tidak mengetahui adanya aplikasi SPKE. Tanpa sosialisasi yang memadai, mereka tidak akan mengetahui prosedur, persyaratan, dan manfaat menggunakan aplikasi tersebut untuk pendaftaran kapal. Hal ini menyebabkan pemilik kapal tidak menyadari manfaat dari menggunakan SPKE, seperti efisiensi waktu, kemudahan proses, dan transparansi. Ketidaktahuan ini mengakibatkan rendahnya minat untuk menggunakan aplikasi tersebut yang pada akhirnya menghambat penerbitan Grosse Akta Kapal.
- b) Data kapal dari pemohon kurang lengkap

Kendala yang dihadapi oleh pihak Syahbandar adalah ketidaklengkapan data persyaratan yang diserahkan oleh pemohon, terutama yang berkaitan dengan nomor mesin kapal. Data ini sangat penting dalam proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan Grosse Akta. Ketika pemohon tidak menyertakan informasi yang lengkap, pihak Syahbandar menghadapi kesulitan untuk memastikan keabsahan data dan spesifikasi teknis kapal. Hal ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam pencatatan kepemilikan kapal.

- c) Data penghadap tidak sesuai dengan pihak yang datang menghadap apabila pemilik kapal diwakilkan atau dikuasakan

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena pada aplikasi, bagian menu data penghadap tidak dapat diedit setelah data dimasukkan. Akibatnya, jika ada ketidaksesuaian antara data penghadap dan identitas pihak yang datang, proses administrasi menjadi terhambat karena tidak ada cara untuk memperbaiki data yang salah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan data penghadap diisi dengan benar sejak awal untuk menghindari masalah ini dan memastikan kelancaran proses administrasi

- d) Masalah sistem pada Aplikasi Pendaftaran kapal

Masalah sistem pada Aplikasi Pendaftaran Kapal dimana tidak munculnya kode billing dapat menyebabkan sejumlah hambatan serius dalam proses pendaftaran kapal. Ketika kode billing yang diperlukan untuk melanjutkan tahap pembayaran tidak muncul, pemohon tidak dapat menyelesaikan pembayaran yang diperlukan. Akibatnya, sistem secara otomatis membaca keterlambatan pembayaran dan menolak permohonan pendaftaran. Masalah ini tidak hanya menyebabkan penundaan signifikan, tetapi juga menambah beban kerja bagi petugas yang harus menangani keluhan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Situasi ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan peningkatan sistem aplikasi untuk memastikan proses pendaftaran yang lebih efisien dan lancar bagi semua pihak yang terlibat.

Optimalisasi Proses Penerbitan Grosse Akta untuk Kapal Nelayan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare

Berdasarkan kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut dijelaskan tahapan pengoptimalan penerbitan Grosse Akta untuk kapal nelayan di kantor KSOP Kelas III Parepare yang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Kurangnya Sosialisasi Aplikasi SPKE

Melakukan pendekatan langsung melalui kunjungan lapangan dengan membentuk tim khusus yang mengunjungi pelabuhan-pelabuhan dan desa-desa nelayan untuk melakukan sosialisasi langsung. Memberikan demonstrasi penggunaan aplikasi SPKE secara langsung kepada para nelayan.

- b) Data kapal dari pemohon kurang lengkap

Pengadaan panduan lengkap dan menyediakan *checklist* dokumen atau formulir yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal nelayan sebelum pengajuan Grosse Akta. Membuat formulir yang lebih sederhana dan jelas, dengan petunjuk pengisian yang

mudah dipahami oleh nelayan. Bagi pemohon yang tidak dapat mengisi persyaratan mengenai mesin kapal karena kurang memahami tentang mesin, dapat melampirkan foto mesin kapal tersebut. Hal ini akan memudahkan pihak Syahbandar dalam memasukkan data-data tersebut tanpa harus melihat mesin kapal secara langsung.

- c) Data penghadap tidak sesuai dengan pihak yang datang menghadap apabila pemilik kapal diwakilkan atau dikuasakan

Kendala pada data penghadap dapat dilakukan dengan memastikan bahwa surat kuasa yang disertakan adalah asli dan sah, serta dilengkapi dengan tanda tangan pemilik kapal yang terverifikasi. Kemudian menetapkan prosedur untuk meninjau ulang dokumen kuasa dan data penghadap sebelum proses pendaftaran selesai. Jika ada ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen.

- d) Masalah sistem pada Aplikasi Pendaftaran kapal

Pada saat proses pembayaran bisa dilakukan dengan merestart aplikasi atau menghubungi tim dukungan teknis atau layanan pelanggan dari aplikasi tersebut untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Pentingnya pemeliharaan dan peningkatan sistem aplikasi untuk memastikan proses pendaftaran yang lebih efisien dan lancar bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan penerapan beberapa upaya tersebut, diharapkan proses penerbitan Grosse Akta di Kantor KSOP Kelas III dapat berjalan lebih optimal, efisien dan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- Proses penerbitan Grosse Akta untuk kapal nelayan di Kantor KSOP Kelas III Parepare melibatkan beberapa tahapan penting dimulai dari pemohon mengumpulkan dan menyerahkan berkas persyaratan, kemudian akan diperiksa oleh petugas. Setelah itu, dokumen tersebut diunggah ke dalam aplikasi pendaftaran kapal. Setelah pembayaran dikonfirmasi, Grosse Akta akan ditandatangani dan diserahkan kepada pemohon.
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses penerbitan Grosse Akta. Seperti, kurangnya sosialisasi mengenai Aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE), Banyak nelayan yang tidak melengkapi berkas persyaratan

akibat kurangnya pemahaman mengenai dokumen yang diperlukan. Terdapat masalah teknis pada sistem pembayaran kode *billing* yang sering mengakibatkan penundaan dalam proses penerbitan. Serta kurangnya informasi dan edukasi mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan Grosse Akta menjadi hambatan signifikan bagi pemohon.

- Untuk mengoptimalkan penerbitan Grosse Akta, beberapa langkah dapat diambil yaitu melakukan sosialisasi mengenai aplikasi dan cara pendaftaran kapal elektronik kepada pemilik kapal, membuat panduan lengkap, melakukan edukasi secara intensif kepada nelayan mengenai pentingnya kelengkapan berkas dan jenis dokumen yang diperlukan serta memperbaiki dan melakukan pemeliharaan rutin pada sistem pembayaran kode *billing* untuk menghindari masalah teknis.

Saran

- Untuk Kantor KSOP:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Parepare sebaiknya menggunakan sistem digital baru yang memudahkan pelayanan agar lebih efisien. Juga, penting untuk melakukan pelatihan kepada pegawai secara rutin tentang prosedur terbaru dan meningkatkan kerja sama dengan instansi lain.

- Untuk Nelayan:

Nelayan sebaiknya aktif mencari informasi tentang cara mendapatkan Grosse Akta melalui sosialisasi yang disediakan oleh KSOP. Selain itu, gunakan teknologi seperti aplikasi atau situs web yang disediakan untuk memeriksa status permohonan dan mendapatkan informasi terbaru.

- Untuk Peneliti Selanjutnya:

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem administrasi baru bekerja setelah diterapkan. Fokuskan pada analisis data dan umpan balik pengguna untuk menemukan kelebihan dan kekurangan sistem, serta menyempurnakan metodologi penelitian di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para nelayan dan pemilik kapal yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu sebagai responden. Penulis juga sangat menghargai bimbingan, masukan, dan dukungan dari Ibu Yustiani Frastica, M.Sc. dan Bapak Ikhsan

Saifudin, S.S.T.Pel. yang telah memberikan arahan dan saran yang berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terakhir, penulis berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi sepanjang proses penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, D. (2019). *Aspek hukum perkapalan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, M. T. (2019). Eksekusi Grosse Akta Merujuk pada Pasal 244 Hir dan Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Axelius, B., Kumara, S. N. I., & Ariastina, G. W. (2022). Review ragam jenis kapal perikanan Indonesia. *Jurnal SPEKTRUM*, 9(3), 84–93.
- Barus, V., Prananingtyas, P., & Malikhatun, S. (2017). Tugas dan tanggung jawab syahbandar dalam kegiatan pengangkutan laut di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles, CA: Sage Publications.
- Jasaruddin, Putra, Z., & Butuni, S. (2020). Analisis tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 410–415.
- Martias, G. I. R. (1987). *Pembahasan hukum: Penjelasan istilah hukum Belanda*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordin, N., & Abdullah, I. (2020). *Manajemen dan regulasi transportasi laut di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo, M. (2016). *Pengantar hukum pelayaran di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Santosa, A., & Sinaga, A. E. (2019). Peran tanggung jawab nahkoda dan syahbandar terhadap keselamatan pelayaran melalui pemanfaatan saran bantu navigasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Saintek Maritim*, 20(1), 29–42.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode penelitian pendidikan*. Jakarta: Rosdakarya.
- Widodo, A. T. (2015). *Dasar-dasar manajemen pelayaran*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wijaya, A. (2018). *Hukum laut internasional dan kebijakan Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Yusuf, H. (2017). *Peran dan fungsi syahbandar dalam pengawasan keselamatan pelayaran*. Jakarta: Rajawali Press.